

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bab ini akan membahas teori yang digunakan dalam penelitian serta penjelasan mengenai *Free cash flow*, Perencanaan Pajak, *Employee diff*, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba.

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi atau *agency theory* adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Dalam teori ini, manajemen perusahaan diibaratkan sebagai agen sedangkan investor atau pemegang saham diibaratkan sebagai prinsipal. Menurut (Jensen and Meckling, 1976) Ketika satu atau lebih prinsipal menyewa agen untuk menyediakan layanan dan mendelegasikan wewenang maka hal tersebut bisa menyebabkan hubungan keagenan terjadi.

Menurut teori keagenan, pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan masing-masing memiliki keinginan dan kepentingan masing-masing, sehingga mereka berusaha untuk mengejar kepentingan tersebut. Prinsipal dan agen menghadapi konflik kepentingan sebagai akibatnya. Pemilik atau prinsipal termotivasi untuk menandatangani kontrak karena ingin sukses dan memperoleh keuntungan yang terus meningkat. Agen termotivasi untuk mendapatkan hasil maksimal dari kebutuhan finansial dan psikologis mereka, seperti mendapatkan investasi, pinjaman, atau kontrak kompensasi. Karena pemilik (principal) tidak dapat mengamati kegiatan manajemen sehari-hari, maka konflik kepentingan pun berkembang. Untuk menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham (pemilik) (Amelia & Hernawati, 2016)

Salah satu tuntutan tanggung jawab manajer kepada pemegang saham adalah memaksimalkan laba perusahaan, sehingga ketika kondisi perusahaan tidak dalam keadaan baik maka hal ini mendorong manajer melakukan tindakan manajemen laba agar kinerjanya selalu terlihat bagus. Hal ini karena sebagai *agent* disisi lain juga perlu untuk memenuhi kebutuhan psikologi dan ekonominya sendiri secara

maksimal, sehingga *agent* mungkin tidak terus dapat bertindak secara baik untuk kepentingan pemegang saham (Khotimah, 2014).

Penelitian Jensen (2020), mengemukakan keberadaan *free cash flow* merupakan salah satu penyebab munculnya masalah keagenan (*agency conflict*). Konflik ini terjadi akibat perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* terkait dengan pendistribusian *free cash flow*. Pemegang saham (*principal*) mengharapkan agen dapat memaksimalkan nilai perusahaan sehingga *free cash flow* dapat dibagikan sebagai dividen yang diterima oleh pemegang saham. Disisi lain, manajemen (*agent*) menginginkan *free cash flow* digunakan untuk ekspansi usaha terutama jika perusahaan tersebut memiliki *investment opportunity* yang tinggi. Masalah keagenan akibat *free cash flow* ini perlu diberikan solusi sehingga tujuan masing-masing pihak dapat terpenuhi (Muiz & Ningsih, 2018).

Laporan keuangan mencerminkan salah satu mekanisme yang dipakai beserta diharapkan bisa menyelaraskan maksud pemilik ataupun pemegang saham atas agen ataupun manajemen saat teori keagenan lantaran basis akrual saat akuntansi. *Accrual basic* yang mensyaratkan bisnis akan mengakui pendapatan ataupun beban yang sebagai hak ataupun kewajiban atas rentang waktu berjalan, sehingga memperoleh komponen akrual yang bagus yang disetujui kebijakan manajemen saat laporan keuangan (*discretionary*) maupun yang tak (*non-discretionary*). Menurut teori keagenan, ada kemungkinan manajemen akan menyembunyikan keadaan ataupun kemampuan keuangan perusahaan yang buruk atas mengambil perbuatan akan menaikkan laba, menurunkan laba, ataupun meratakan laba (Barus & Setiawati, 2015)

Manajer sebagai agen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal melalui laba yang dihasilkan. Kemudian sebagai imbalan atas kinerjanya, agen akan menerima reward dari prinsipal. Namun dalam kenyataannya, manajer sebagai agen memiliki tujuan yang bertentangan dengan tujuan pihak prinsipal dan hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Seorang manajer akan cenderung memikirkan kepentingan pribadinya dan hal tersebut akan mendorong manajer untuk melakukan praktik manajemen laba guna memperoleh kepentingan pribadi.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata mengabdikan tunduk dan taat. Sesuai dengan KBBI (rujukan Kata Bahasa Indonesia Besar), patuh berarti tunduk pada perintah, mematuhi permintaan atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti mematuhi aturan dan ajaran dan tunduk padanya.

Hubungan antara teori kepatuhan dan manajemen laba terkait dengan pajak adalah bahwa dalam mengumpulkan biaya semua warga negara harus mematuhi, menyesuaikan, dan menyetujui pedoman tugas yang relevan, ini adalah pemenuhan komitmen pengeluaran yang dilakukan oleh warga negara untuk menambah kemajuan normal dalam kepuasan yang diberikan dengan sengaja. Mengingat bahwa sistem perpajakan Indonesia bersifat *self-assessment*, maka kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting.

Hubungan antara teori kepatuhan dalam penelitian ini adalah kepatuhan dalam perpajakan melalui perencanaan pajak diterapkan oleh perusahaan untuk dapat mengendalikan risiko keuangan perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan pajak yang berlaku, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah, perusahaan pun memiliki kewajiban kepada pemegang saham. Sehingga semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, maka dari itu perusahaan harus dapat melakukan perencanaan pajak yang matang dengan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. (Serly & Watriani, 2021)

2.1.3 Manajemen Laba

2.1.3.1 Definisi Manajemen Laba

Setelah mengurangkan biaya keluar dari pendapatan, hasil perhitungannya adalah laba. *Investor* dan pihak berkepentingan lainnya memandang informasi laba sebagai tanda seberapa baik perusahaan menggunakan uang yang telah diinvestasikan di dalamnya, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pengembalian (Wirawan, 2020).

Menurut teori keagenan, pemilik dan manajer mungkin memiliki kepentingan berlawanan yang mengarah pada manajemen laba. Perusahaan mungkin mengalami hal ini karena manajer memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pemegang

saham dan menggunakannya untuk meningkatkan utilitas. Menurut Subramanyam (2017), manajemen laba merupakan intervensi dengan tujuan tertentu oleh manajemen dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuannya sendiri. (Makaombohe et al., 2014)

Window dressing pada laporan keuangan khususnya jumlah laba *bottom-line* adalah praktik umum dalam manajemen laba. Manajemen laba bisa bersifat memanipulasi, dan jika akrual dirusak oleh manajer, tidak akan berdampak pada arus kas. Menurut Subramanyam (2017), jika manajer mengambil tindakan yang berkaitan dengan konsekuensi arus kas untuk tujuan pengelolaan laba, manajemen laba juga dapat menjadi nyata.

Sebaliknya, manajemen laba sebagaimana didefinisikan oleh Tundjung (2018) adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi yang mengikuti suatu standar tertentu agar dapat mempengaruhi laba sehingga sesuai dengan yang diinginkan melalui pengelolaan faktor-faktor internal yang dimiliki. atau digunakan oleh bisnis.. Definisi manajemen laba atau *earnings management* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Definisi sempit

Dalam hal ini, pemilihan metode akuntansi merupakan satu-satunya aspek manajemen laba. Perilaku manajer untuk memanajemen laba dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya laba hal ini disebut sebagai manajemen laba dalam arti sempit.

2. Definisi luas

Tindakan seorang manajer untuk menambah atau mengurangi laba yang dilaporkan unit namun tidak mempengaruhi profitabilitas ekonomi jangka panjang perusahaan tersebut dikenal juga sebagai manajemen laba. (Sulistyanto, 2018).

Penulis menyimpulkan bahwa manajemen laba adalah tindakan atau usaha manajer untuk mengurangi, merata-ratakan, atau meningkatkan laporan laba perusahaan sesuai dengan hasil yang diinginkan manajemen dari definisi manajemen laba di atas. Karena informasi laba yang diperoleh tidak mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, hal ini tentunya merugikan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2018) Manajer didorong untuk melakukan manajemen laba karena berbagai alasan, termasuk motivasi bonus, motivasi kontraktual lainnya, motivasi pajak, motivasi politik, IPO, pergantian CEO, dan memberikan informasi kepada investor. Masing-masing motivasi praktik pada manajemen laba ini akan dibahas secara rinci di bawah ini:

1. Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*)

Dengan menetapkan kebijakan bonus setelah mencapai tujuan yang ditetapkan, perusahaan bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja karyawan dan manajemen dalam hal ini. Dalam mengevaluasi *performance management*, tingkat keuntungan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu sering dijadikan sebagai indikator. Akibatnya, manajemen berusaha untuk mengontrol laba yang dilaporkan untuk mendapatkan bonus yang didapat secara maksimal.

2. Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*)

Manajer memiliki insentif yang kuat untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi perjanjian hutang dan kewajiban kontrak lainnya yang harus dipenuhi atau perusahaan akan menghadapi sanksi. Akibatnya, manajer mengelola laba untuk mematuhi perjanjian hutang mereka.

3. Motivasi Politik (*Political Motivation*)

Monopoli industri akan didirikan oleh perusahaan yang kuat dan strategis. Akibatnya, perusahaan menggunakan prosedur akuntansi untuk mengurangi laba bersih yang dilaporkan untuk melakukan manajemen laba guna mengurangi visibilitasnya.

4. Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*)

Untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, manajemen terdorong untuk melakukan manajemen laba dengan cara mengurangi laba agar pajak yang dikenakan dan perusahaan bisa meminimalkan pembayaran pajak.

5. Pergantian *CEO (Chief Executive Officer)*

Pada saat CEO diganti maka manajemen laba akan termotivasi agar dinilai berkinerja baik, CEO baru melakukan pendekatan strategis dengan memaksimalkan keuntungan.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang baru pertama kali go public belum memiliki nilai pasar. Untuk meningkatkan harga saham perusahaan, maka manajemen akan menerapkan manajemen laba dalam laporan keuangannya.

7. *Pemberian Informasi Kepada Investor (Communicate Information to Investors)*

Untuk meningkatkan tampilan laporan keuangan perusahaan, manajemen menerapkan manajemen laba. Hal ini disebabkan karena investor sering menilai perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. Investor kemungkinan akan menggunakan laba yang dilaporkan saat ini untuk mengevaluasi kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang karena mereka akan lebih tertarik dengan kinerja keuangan perusahaan di masa depan atau mendatang.

2.1.3.3 Bentuk Manajemen Laba

Manajer harus sangat berhati-hati ketika memilih metode akuntansi untuk manajemen laba sehingga pengguna laporan keuangan tidak menyadarinya. Akibatnya, manajer harus menyusun rencana untuk menyembunyikan manajemen laba dari pihak luar. Sistem yang diambil berhubungan dengan jenis apa yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan bagi para eksekutif. Menurut Sulistyanto (2014) ada empat macam manajemen laba, yaitu:

1. *Taking a Bath*

Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan kerugian pada periode berjalan dan biaya pada periode mendatang ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dihindari terjadi pada periode saat ini. Akibatnya, manajemen melakukan self-cleaning dengan memaksakan estimasi masa depan yang berujung pada overestimasi laba periode berikutnya.

2. *Income Increasing*

Ketika profitabilitas perusahaan sangat tinggi, manajemen menggunakan

manajemen laba untuk menarik perhatian pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang diambil antara lain pengisian untuk periklanan, penelitian, dan pengembangan.

3. *Income Maximization*

Tujuan maksimalisasi pendapatan adalah untuk meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang menghadapi perjanjian atau kontrak kredit dan hutang, Perusahaan yang akan memberikan kontribusi dasar (penawaran umum perdana), dan perusahaan yang memutuskan terakit kompensasi manajemen berdasarkan keuntungan yang dihasilkan biasanya menggunakan laba semacam ini bagi para eksekutif.

4. *Income Smoothing (Perataan Laba)*

Jenis manajemen laba yang paling umum adalah perataan laba. Hal ini karena manajemen dapat menambah atau mengurangi laba melalui perataan laba. Perataan laba adalah strategi yang diterapkan oleh manajemen untuk mengurangi ayunan laba dan menghadirkan citra bisnis yang lebih stabil dan kurang berisiko. Investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan karena penampilannya yang stabil.

2.1.3.4 Pendekatan Manajemen Laba

Dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa kualitas laba positif karena beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa bisnis secara aktif mempraktikkan manajemen laba ketika memanipulasi laporan keuangan. Dalam pengujian Ahim Abdurahman (2018) terhadap Dechow et al., (2020), model pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. *The Healy Model*, yaitu membandingkan rata-rata total akrual dengan menggunakan skala selisih total aset dengan variabel pemisah manajemen laba untuk menentukan ada tidaknya manajemen laba.
2. *The Angelo Model*, secara khusus, model ini menggunakan total akrual periode sebelumnya dibagi dengan selisih total aset sebagai ukuran *non discretionary accrual* untuk menguji keberadaan manajemen laba. Ini mengasumsikan bahwa jika perbedaannya diharapkan, maka tidak ada manajemen laba.

3. *The Jones Model*, yaitu mengendalikan dampak perubahan lingkungan ekonomi perusahaan terhadap *non discretionary accrual* dengan membuat asumsi bahwa *non discretionary accrual* tetap konstan.
4. *The Modified Jones Model*, Model ini diestimasi pada periode peristiwa untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pengukuran model Jones dalam *discretionary accrual*.
5. *The Industry Model*, diasumsikan bahwa *non discretionary accrual* memiliki nilai konstan dan faktor-faktor yang menentukannya seringkali bervariasi.

Berdasarkan Modified Jones Model yang merupakan modifikasi dari model Jones, penelitian ini menggunakan pengukuran *discretionary accrual* karena model Jones memiliki beberapa kekurangan, antara lain asumsi implisit bahwa pendekatannya *non discretionary*. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak boleh memanipulasi pendapatan Model Jones. *Discretionary accrual* atau kesalahan dan residu persamaan biasanya akan menjadi bias menuju nol jika manajemen memanipulasi pendapatan. (Nazalia & Triyanto, 2018)

Modified Jones Model digunakan karena memperhitungkan pendapatan sebagai *discretionary accrual* dan mengasumsikan bahwa pendapatan dapat dimanipulasi. Akibatnya, dianggap lebih baik dalam mengukur dan mendeteksi manajemen laba daripada model lainnya, menurut Wardani & Santi (2018) dan Ricardo (2015). Selain itu, manajemen laba dengan model Jones yang dimodifikasi telah menjadi subyek banyak penelitian.

2.1.4 *Free cash flow*

2.1.4.1 Definisi *Free cash flow*

Menurut Kieso (2015), *Free cash flow* merupakan arus kas bebas yang merupakan arus kas diskresioner yang dimiliki oleh perusahaan, arus kas ini dapat digunakan untuk membayar hutang, menambah investasi, membeli saham treasury atau menambah likuiditas. Ross. et. Al (2015) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen perhitungan *free cash flow*, antara lain arus kas operasi, belanja modal bersih dan perubahan modal kerja. Arus kas operasi merupakan perhitungan yang didapatkan dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya melalui arus kas. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan perusahaan

untuk menambah modal dan pemeliharaan modal yang dapat menambah aset. Sedangkan modal kerja bersih adalah selisih dari aktiva lancar dan hutang lancar perusahaan apabila menghasilkan hasil yang positif hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau sehat, demikian yang diungkapkan oleh (Ross et. al. 2015)

Para ahli telah menulis bahwa arus kas bebas perusahaan, atau kas bebas, adalah jumlah uang tunai yang tersedia bagi investor-penyedia utang (kreditur) dan ekuitas (pemilik) setelah perusahaan membayar investasi dalam aset tetap bersih dan aset lancar dan memenuhi semua kebutuhan operasi. (Baraja et al., 2017)

Kas perusahaan yang dapat dibagikan kepada pemegang saham atau kreditur tetapi tidak digunakan untuk modal kerja (*working capital*) atau investasi pada aset tetap disebut arus kas bebas. Arus kas bebas dapat dimanfaatkan untuk hal-hal seperti akuisisi dan belanja modal yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*), melunasi utang, dan memberikan dividen kepada pemegang saham. Artinya, perusahaan lebih sehat jika memiliki lebih banyak arus kas bebas karena memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan untuk pertumbuhan, pembayaran utang, dan dividen. (Teguh & Lesati, 2013)

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 Tahun 2009, mendefinisikan arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas utama perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Arus kas tersebut biasanya berasal dari aktivitas yang menetapkan untung dan rugi. Sedangkan belanja modal adalah arus kas yang digunakan untuk investasi pada suatu periode, belanja modal biasanya dicatat sebagai pembelian aset tetap, pemeliharaan, dan lain-lain. Pengeluaran atau pemasukan investasi untuk aset tetap yang tidak berpengaruh terhadap penambahan aset tetap tidak dianggap sebagai belanja modal. Meski dinamakan arus kas bebas, namun pihak manajemen tidak bisa serta merta bebas mempergunakan uang ini, dikarenakan uang sisa tersebutlah yang dapat dipergunakan sebagai alat pengembangan usaha, jika perusahaan enggan mengambil dana dari hutang dan sumber dana lainnya. Apabila setelah melakukan perhitungan terhadap arus kas dan menghasilkan arus kas bebas yang bernilai negatif, maka hal itu harus menjadi perhatian perusahaan karena hal itu menandakan pendapatan perusahaan tidak mampu menunjang ekspansi ataupun pengembangan usaha perusahaan tersebut.

Untuk menutupi hal tersebut, biasanya perusahaan menutupinya dengan cara melalui pinjaman ataupun obligasi. Apabila kondisi arus kas bebas negatif hingga melebihi satu periode operasi, hal tersebut tidak semata-merta menandakan keuangan perusahaan buruk, karena bisa juga dikarenakan adanya ekspansi perusahaan yang menyerap dana sangat besar, untuk itulah pentingnya melakukan pengecekan pada CALK.(Fatmala & Riharjo, 2019)

2.1.5 Tax Planning (Perencanaan Pajak)

2.1.5.1 Definisi Tax planning

Sebagai wajib pajak, pelaku usaha wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Kewajiban ini dihitung dengan mengalikan laba bersih perusahaan sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Namun, tujuan perusahaan sebagai badan pembayar pajak, yaitu memaksimalkan keuntungan, berbeda dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Sehingga hal ini akan memicu sebuah metodologi untuk menghindari pungutan-pungutan yang terkesan sebagai *corporate duty planning* (pengaturan pungutan) atau dengan pungutan yang memaksa. Pengaturan biaya adalah cara paling umum untuk mengendalikan aktivitas agar terhindar dari hasil tugas yang tidak diinginkan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam administrasi perpajakan. Pada tahap ini dilakukan penjajakan dan pendalaman terhadap peraturan beban dan pedoman untuk dapat memilih perkiraan dana cadangan yang harus diselesaikan.(Tasya & Dewi, 2022)

Menurut Pohan (2017) mengatakan bahwa : “*Tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benarbenar efisien”.

Tax planning itu sendiri merupakan proses atau strategi legal yang dilakukan oleh warga negara sehingga kewajiban penilaiannya adalah jumlah pokok, namun tanpa mengabaikan peraturan tugas yang bersangkutan.(Maslihah, 2019)

Tindakan perencanaan pajak ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang terkait regulasi yang menguntungkan dunia usaha dan tidak merugikan pemerintah secara hukum. Hal ini tidak dimaksudkan untuk melanggar kewajiban perpajakan. Perencanaan pajak dan penghindaran pajak adalah hal yang sama jika tujuan

perencanaan pajak adalah untuk mengurangi pajak sebanyak mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi jika pembuat undang-undang memiliki tujuan yang berbeda, perencanaan pajak dan penghindaran pajak adalah hal yang sama. (Lubis & Suryani, 2018)

Menurut Pohan (2017) terdapat 6 hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam berperilaku untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, yaitu antara lain:

1. Tingkat kerumitan dalam suatu peraturan

Semakin rumit peraturan dalam perpajakan, maka kemungkinan akan muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pajak karena biaya untuk mematuhi peraturan menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar sebuah perusahaan

Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, maka akan semakin besar pula kecenderungan wajib pajak dalam melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya dalam bernegosiasi

Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang wajib pajak juga perlu melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan bahkan suap kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, maka akan semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Risiko deteksi

Kemungkinan ditemukan atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan ini menjadi dasar dari risiko deteksi ini. Wajib pajak lebih cenderung melanggar hukum ketika mereka cenderung tidak diperhatikan. Di sisi lain, jika pelanggarannya jelas, wajib pajak akan mengambil sikap konservatif dan tidak melanggar aturan.

5. Besarnya denda

Pengesahan tugas yang lebih ekstrim yang dapat dipaksakan, warga negara akan cukup sering mengambil situasi yang moderat dengan tidak mengabaikan pedoman pungutan. Di sisi lain, wajib pajak lebih cenderung melanggar hukum jika mereka menghadapi hukuman yang ringan atau bahkan tidak ada hukuman atas

tindakan mereka.

6. Moral masyarakat

Kepatuhan dan kesadaran mereka akan hak dan kewajiban pajak mereka akan dipengaruhi oleh moralitas publik.

Dari paparan faktor-faktor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Peraturan dan pedoman biaya yang semakin membingungkan meningkatkan biaya konsistensi. Untuk mendapatkan konsistensi warga dengan harga yang minimal, pengaturan tarif diharapkan antara lain dengan memilih tenaga-tenaga ahli di bidangnya.
- b. Kesalahan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan menyelesaikan sengketa perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dengan mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali, litigasi perpajakan dapat digunakan untuk perencanaan pajak.
- c. Perencanaan pajak diperlukan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk menghindari otoritas pajak memeriksa proses tersebut.
- d. Orang cenderung tidak merencanakan pajak mereka jika mereka lebih bahagia

2.1.5.2 Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan 2017) ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cerdas dan cermat, yaitu :

1. Menghemat uang karena dimungkinkan untuk mengurangi beban pajak terkait biaya..
2. Agar pelaku usaha dapat menyusun anggaran kas dengan lebih akurat, mengatur arus kas masuk dan keluar. Dengan perencanaan pajak yang cermat, dimungkinkan untuk memperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan waktu pembayaran.

2.1.5.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2017) secara umum terdapat tujuan pokok yang ingin

dicapai dari perencanaan pajak yang baik, yaitu :

1. Meminimalisasi beban pajak terutang.
2. Memaksimalkan penghasilan atau laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) apabila terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus atau petugas pajak.
4. Memenuhi kewajiban dan mematuhi perpajakannya secara benar, efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
 - a. Menyetujui setiap pengaturan peraturan, untuk menghindari ketidaknyamanan persetujuan baik otorisasi otoritatif maupun kriminal, seperti bunga, bangunan, denda, dan pembatasan atau penahanan.
 - b. Secara efektif mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemasaran, pembelian, dan keuangan, termasuk pemotongan dan pemungutan pajak.

Dari beberapa poin tersebut, dapat diasumsikan bahwa perusahaan akan memanfaatkan biaya yang berbeda untuk meningkatkan keuntungan keseluruhan setelah biaya dan membatasi guncangan biaya jika terjadi tinjauan tugas. Kebijakan dadakan untuk mengelola pajak yang harus dikeluarkan disebut dengan kejutan pajak (*tax surprise*).

2.1.5.4 Modus Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2017) menjelaskan adanya empat modus yang biasanya digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu :

- a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) adalah upaya penghindaran pungutan pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi warga negara karena mereka tidak bergumul dengan pengaturan pungutan, dimana jangka waktu dan prosedur yang digunakan umumnya akan mengeksploitasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam peraturan-peraturan dalam peraturan dan pedoman biaya itu sendiri, untuk membatasi seberapa besar penilaian terutang dibayar.
- b. *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) adalah upaya-upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya guna menghindari pembayaran pajak secara melawan hukum. Strategi ini kurang baik bagi masyarakat, karena teknik dan prosedur yang digunakan

tidak sesuai dengan peraturan dan pedoman biaya. Strategi yang diambil adalah pertaruhan tinggi dan dapat mengarah pada otorisasi hukum / keuangan, atau persetujuan kriminal. Dengan demikian, strategi ini tidak disarankan untuk digunakan.

- c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak) adalah usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi penghasilannya dan menghindari pembayaran pajak penghasilan yang besar dengan menghindari pembelian barang atau jasa yang dikenai pajak lebih tinggi atau dengan sengaja mengurangi jumlah pekerjaan atau jam kerja yang mereka lakukan.

2.1.6 *Employee diff*

2.1.6.1 Definisi *Employee diff*

Faktor non finansial yang digunakan dalam penelitian ini adalah *employee diff*, yaitu perbedaan antara pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan karyawan. Perbedaan inilah yang seringkali dimanfaatkan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan dengan melakukan manajemen laba. *Employee diff* dipilih untuk mewakili faktor non finansial yang mempengaruhi manajemen laba, karena karyawan merupakan faktor non finansial yang berhubungan dengan perhitungan laba pada laporan laba rugi. Karyawan berhubungan dengan peningkatan laba yang dihasilkan perusahaan dan juga karyawan merupakan faktor non finansial yang dapat dihitung.

Employee diff merupakan suatu ukuran untuk membandingkan antara tingkat pendapatan dengan karyawan pada suatu perusahaan. Produksi biasanya akan meningkat dalam perusahaan besar dengan banyak karyawan. Biasanya, pendapatan dari penjualan akan meningkat seiring dengan peningkatan hasil produksi. Namun, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan meningkat pula. Menurut Brazel et al., (2019) menyatakan bahwa *employee diff* dapat diartikan sebagai variabel dalam pengukuran perbedaan presentase antara perubahan pendapatan dan perubahan jumlah karyawan. Dalam sebuah perusahaan karyawan merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan operasional. Tanpa adanya karyawan maka perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tenaga kerja dan peralatan merupakan suatu investasi yang dapat

menaikkan penjualan dimasa depan dan profitabilitas (Alfiah, 2017). Jumlah tenaga kerja yang tinggi akan mengakibatkan tingginya biaya pengeluaran perusahaan, karena biaya tenaga kerja harus dibebankan ketika terjadinya. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut diduga manajer akan berusaha untuk menutupi penurunan kinerja keuangan dengan mengurangi jumlah 19 karyawan, dengan tujuan menaikkan laba bersih (Alfiah, 2017).

Dalam penelitiannya Brezel et al., (2019) menggunakan rasio-rasio yang non keuangan seperti halnya jumlah karyawan, jumlah cabang, jumlah kunjungan pasien, jumlah fasilitas produksi, jumlah paten, jumlah pusat distribusi, dan luas fasilitas produksi untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Karena rasio keuangan sudah seringkali diteliti oleh penelitian terdahulu. Alasan penggunaan rasio non keuangan adalah pada umumnya jika menggunakan rasio keuangan, banyak ditemukan pada data tersebut yang sudah termanipulasi oleh pihak manajemen. Oleh karena itu Brezel et al., (2019) menggunakan rasio non keuangan (*non-financial measures*) sebagai variabel yang akan diteliti untuk menemukan kecurangan pelaporan keuangan.

2.1.7 Beban Pajak Tangguhan

2.1.7.1 Definisi Beban Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2015), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul dari perbedaan temporer antara laba pajak (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) dan laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan pihak eksternal). Akibat kemungkinan pengakuan manfaat dan beban pajak tangguhan, pengakuan pajak tangguhan berdampak pada berkurangnya laba atau rugi bersih (Waluyo, 2015).

Menurut Waluyo (2015), pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dipulihkan pada periode berikutnya sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Jumlah ini dapat dikurangkan dari kerugian. Karena adanya kemungkinan untuk mengakui manfaat atau beban pajak tangguhan, maka pengakuan pajak tangguhan berdampak pada penurunan laba atau rugi neto (bersih). Pengakuan terhadap aset dan liabilitas pajak tangguhan berlandaskan fakta kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan

liabilitas/pembayaran yang menjadi lebih besar atau kecil pada periode mendatang dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekuensi pajak. (Achyani & Lestari, 2019)

Seperti yang dinyatakan oleh PSAK No. 46 (IAI, 2009) biaya yang diakui adalah saldo catatan pada laporan aset sebagai pengurangan pajak yang jumlahnya adalah jumlah yang dinilai yang kemungkinan akan dikenakan sanksi di periode selanjutnya karena perbedaan yang tidak permanen antara norma pembukuan moneter dan pedoman biaya dan karena kemalangan saldo yang dapat dibayar dalam periode berkelanjutan. Berdasarkan definisi di atas, beban pajak tangguhan adalah beban pajak yang timbul akibat koreksi negatif yang menurunkan pajak terutang dalam akuntansi fiskal dibandingkan dengan beban pajak dalam akuntansi komersial.

2.1.7.2 Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanen

Pajak tangguhan merupakan kerugian keuangan yang masih dapat dikompensasi di masa mendatang yang harus disajikan dalam laporan keuangan dalam periode tertentu, serta dampak pajak penghasilan di masa mendatang yang disebabkan oleh perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan (Cheng, 2019).

1. Perbedaan Temporer atau Waktu

Dalam PSAK No. 46 tahun 2013 perbedaan temporen adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas dan jumlah tercatatnya dalam laporan posisi keuangan. Perbedaan dari waktu ke waktu dapat meliputi::

- a) Perbedaan temporer kena pajak, juga dikenal sebagai perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah kena pajak ketika nilai tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan pada periode mendatang.
- b) Perbedaan temporer dapat dikurangkan, juga dikenal sebagai perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan dalam perhitungan laba kena pajak (rugi pajak) masa depan.

Menurut (Lestari & Kurnia, 2015) Perbedaan temporer mengacu pada perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dan dasar pengenaan pajaknya,

yang dapat mengubah laba keuangan di masa mendatang. Ketika aset dipulihkan atau ketika kewajiban dibayarkan atau dibayar, terjadinya perubahan ini dapat meningkat (jumlah kena pajak di masa depan) atau berkurang (jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan). Aset atau liabilitas pajak tangguhan diakui sebagai akibat dari perbedaan singkat ini. Menurut Waluyo (2015) hal ini dapat terjadi pada kondisi berikut:

- a) Gaji atau biaya yang harus dirasakan untuk menghasilkan manfaat atau manfaat bisnis yang tersedia dalam berbagai periode.
- b) *Goodwill* positif atau negatif terkait konsolidasi.
- c) Perbedaan antara jumlah penyampaian dan dasar penilaian sumber daya atau tanggung jawab pada pengakuan awal.
- d) Dalam kombinasi perusahaan, sebagian biaya akuisisi dialokasikan ke aset atau liabilitas tertentu berdasarkan nilai wajar, namun undang-undang pajak melarang perlakuan akuntansi semacam itu.

Adapun menurut Marisi P. Purba (2019) Setiap perbedaan temporer kena pajak diperlakukan sebagai kewajiban pajak tangguhan. Namun, untuk tujuan perpajakan, tidak semua perbedaan temporer dapat dikurangkan. Terdapat beberapa pengecualian, diantaranya:

- a) Kewajiban beban yang diakui yang muncul dari perbedaan singkat dalam kepentingan dalam organisasi terkait, pembantu dan usaha bersama tidak dianggap jika organisasi induk dan kaki tangannya dapat menangani perencanaan pembalikan perbedaan sementara.
- b) Selisih yang timbul dari pengakuan awal goodwill yang dihasilkan dari kombinasi bisnis tidak mengakibatkan pengakuan liabilitas pajak tangguhan.
- c) Perbedaan temporer antara pengakuan aset dan liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan transaksi kombinasi bisnis tidak mengakibatkan pengakuan liabilitas pajak tangguhan. Laba akuntansi dan laba kena pajak tidak terpengaruh oleh transaksi kombinasi bisnis.

2. Perbedaan Permanen atau Tetap

Menurut Waluyo (2015), Perbedaan pengakuan penghasilan atau beban berdasarkan undang-undang perpajakan dan prinsip akuntansi yang bersifat

permanen atau tetap disebut sebagai perbedaan tetap. Artinya, perbedaan ini tidak akan hilang setelah beberapa waktu. Perbedaan tetap timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pelaporan pajak (fiskal). Akibat dari perbedaan ini berdampak pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar menghitung pajak yang terutang.

2.1.8 Ukuran Perusahaan

2.1.8.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Suwito dan Herawati (2015) Istilah *firm size* atau ukuran perusahaan mengacu pada skala di mana bisnis dapat dikategorikan dalam beberapa cara berbeda. Hanya ada tiga jenis perusahaan: bisnis besar, bisnis menengah, dan bisnis kecil.

Menurut Riyanto (2016) Istilah *firm size* atau ukuran perusahaan mengacu pada jumlah total aset perusahaan, penjualan rata-rata, dan total aset. Seperti yang ditunjukkan oleh Bringham dan Houston (2016) pengertian dari ukuran organisasi tersebut adalah kesepakatan bersih lengkap tipikal untuk tahun yang dimaksud cukup lama. Jumlah pendapatan sebelum pajak akan diperoleh jika penjualan lebih besar dari biaya variabel dan biaya tetap. Sebaliknya, usaha akan mengalami kerugian jika penjualan lebih rendah dari biaya variabel dan biaya tetap Sawir (2015).

Hampir setiap penelitian menyebutkan ukuran perusahaan sebagai faktor dalam struktur keuangan karena berbagai alasan, antara lain: Pertama, kemampuan perusahaan untuk mengakses modal dari pasar modal dapat dipengaruhi oleh ukurannya. Usaha kecil jarang memiliki akses ke pasar modal saham dan obligasi yang terorganisir. Bahkan jika mereka memiliki akses, biaya peluncuran terkait dengan penjualan sekuritas dalam jumlah terbatas mungkin menjadi penghalang. Sekuritas bisnis kecil mungkin menjadi kurang dapat dipasarkan jika dapat diterbitkan, memerlukan penetapan harga yang menawarkan pengembalian yang jauh lebih tinggi kepada investor. (Bangun & Christabel, 2020)

Kedua, ukuran organisasi menentukan kekuatan transaksi dalam perjanjian moneter. Organisasi besar biasanya dapat memilih subsidi dari berbagai jenis kewajiban, termasuk penawaran unik yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan oleh organisasi kecil, semakin besar kemungkinan menyusun kontrak

kewajiban standar. Ketiga, dapat dibayangkan bahwa dampak skala pada pengeluaran dan pengembalian memungkinkan perusahaan yang lebih besar memperoleh lebih banyak manfaat. Akhirnya, ukuran organisasi diikuti oleh kualitas berbeda yang memengaruhi konstruksi moneter. Ciri-ciri lain, misalnya, organisasi seringkali tidak memiliki staf yang luar biasa, tidak menggunakan anggaran keuangan, dan tidak membentuk sistem pembukuan mereka menjadi sistem manajemen. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB), dikutip oleh Belkoui (2016), mengidentifikasi perbedaan berikut antara usaha kecil dan besar:

1. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah sebuah perusahaan yang tugasnya cukup kecil, biasanya dengan pendapatan total di bawah \$5 juta. Biasanya, bisnis ini:

- a) diawasi oleh pemiliknya, dan jika seseorang memiliki beberapa pemilik yang berbeda,
- b) semua pemilik secara efektif terlibat dalam pelaksanaan masalah organisasi, kecuali mungkin untuk anggota keluarga tertentu,
- c) memiliki desain modal sederhana dalam organisasi kecil,
- d) jarang terjadi pertukaran kepemilikan.

2. Perusahaan Besar

Perusahaan besar biasanya diidentifikasi dengan perusahaan publik atau perusahaan yang dikenal banyak masyarakat dimana suatu perusahaan yang:

- a) Penawaran menjual saham di pasar umum atau perdagangan saham atau pasar melalui loket atau organisasi,
- b) Penawaran menjual saham di pasar umum atau perdagangan saham atau pasar melalui loket atau organisasi,
- c) Diharapkan untuk memberikan laporan keuangannya kepada Komisi Perlindungan dan Perdagangan. Jika sebuah perusahaan menerbitkan laporan keuangannya untuk persiapan penjualan sekuritas di bursa publik, itu juga dapat dianggap sebagai perusahaan publik.

Ukuran perusahaan diatur oleh UU RI No. 20 Tahun 2008 dimana jumlah penjualan dan aset yang dimiliki suatu perusahaan dapat digunakan untuk menentukan salah satu dari empat ukuran yang dijelaskan dalam peraturan tersebut.

Keempat ukuran tersebut adalah sebagai berikut::

- a) Usaha mikro dengan total penjualan Rp 300.000.000 dan kekayaan bersih Rp 50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan)
- b) Perusahaan dengan usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk luas dan bangunan) dan mendapatkan penawaran all out sebesar Rp. 300.000.000 menjadi Rp. 2.500.000.000,-
- c) Organisasi dengan organisasi menengah, yang memiliki total aset Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. Dengan total penjualan Rp 10.000.000.000 (belum termasuk tanah dan bangunan), 2.500.000.000 menjadi Rp. 50.000.000.000,-.
- d) Usaha besar dengan total pendapatan Rp50.000.000.000,00 dan kekayaan bersih Rp10.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan).

2.1.8.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No. 20 Tahun 2008 juga mendeskripsikan klasifikasi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha berkembang yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha kecil yang memenuhi definisi usaha mikro menurut undang-undang.
2. Perusahaan perseorangan adalah usaha keuangan bermanfaat yang bersifat tunggal yang dilakukan oleh orang-orang atau unsur-unsur usaha yang bukan merupakan pembantu atau bukan bagian dari organisasi yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun berimplikasi dengan perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri atau besar. organisasi yang memenuhi model usaha mandiri sebagaimana disinggung dalam peraturan ini.
3. Usaha ekonomi menengah adalah usaha yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang atau usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. bisnis dengan total aset. hasil transaksi bersih atau tahunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.

4. Badan usaha dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, seperti perusahaan patungan, badan usaha milik negara atau swasta nasional, dan badan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk dalam kategori usaha besar.

Kategori ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional terbagi menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan Besar adalah usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 miliar termasuk area dan bangunan. memiliki penjualan yang melebihi Rp. 50 miliar/tahun.
- b. Perusahaan Menengah adalah organisasi yang memiliki total aset sebesar Rp. 1-10 miliar termasuk area dan struktur. memiliki hasil penjualan kurang dari atau sama dengan Rp. 50 miliar
- c. Perusahaan Kecil adalah organisasi yang memiliki total aset paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan dan penjualan minimal Rp. 1 miliar per tahun.

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Small Business Administration (SBA) dalam Restuwulan (2015), yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

<i>Small Bussiness</i>	<i>Employment Size</i>	<i>Assets Size</i>	<i>Sales Size</i>
<i>Family Size</i>	1 - 4	<i>Under \$100.00</i>	<i>\$100.00 - 500.00</i>
<i>Small</i>	5 - 19	<i>\$100.00 - \$500.00</i>	<i>\$500.000 - 1 Million</i>
<i>Medium</i>	20 - 99	<i>\$500.00 - 5 Million</i>	<i>\$1 Million - 10 Million</i>
<i>Large</i>	100 - 499	<i>\$5 - 25 Million</i>	<i>\$10 Million - 50 Million</i>

Sumber: Small Business Administration (Restuwulan, 2015)

Sedangkan di Indonesia organisasi yang dilimpahkan organisasi besar atau kecil diatur dalam Pasal 1 Surat Pernyataan Direktur Badan Penyelenggara Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/1997:

- a. Perusahaan Menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia dengan kekayaan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
- b. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki seluruh sumber daya atau aset lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

2.1.8.3 Indikator Ukuran Perusahaan

Perusahaan dikategorikan sebagai besar atau kecil berdasarkan indikator yang mempengaruhinya. Sesuai Suwito dan Herawaty (2015) petunjuk dalam ukuran organisasi adalah semua sumber daya, nilai tukar keuangan, gaji habis-habisan dan lain-lain.

Sementara itu, menurut Sudarmaji (2017) tanda-tanda ukuran organisasi adalah sumber daya absolut, kesepakatan, dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan ditentukan oleh total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasarnya. Bila variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat menunjukkan ukuran perusahaan Semakin banyak aset, modal yang diinvestasikan, penjualan, dan uang beredar, serta semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar status sosialnya.(Nursiam, 2021)

Indikator penelitian ini terbatas dari sekian banyak indikator yang mempengaruhi klasifikasi ukuran perusahaan. Hal ini membuat mereka lebih fokus dan memastikan bahwa hasil memenuhi asumsi yang diharapkan. Total aset dipilih sebagai salah satu indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana dinyatakan oleh PSAK No. 1 (2017) mendefinisikan aset sebagai setiap dan semua manfaat ekonomi yang menjadi bagian dari kegiatan operasional perusahaan dan mengandung potensi produktif. Mungkin juga melalui sesuatu yang dapat diubah menjadi uang tunai atau sebagai kemampuan untuk mengurangi biaya tunai, seperti penurunan biaya karena proses produksi elektif.

Menurut Rahmawati (2017) ukuran organisasi adalah proporsi dari seberapa banyak sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga organisasi yang besar sebagian besar memiliki sumber daya yang sangat besar juga. Berdasarkan besar kecilnya total aset perusahaan, penelitian ini menentukan ukuran perusahaan. Hampir setiap penelitian, dengan berbagai alasan, menyebutkan ukuran perusahaan sebagai penentu struktur keuangan, menurut Agus Sawir (2014):

1. Kemudahan suatu perusahaan mengakses modal pasar dipengaruhi oleh ukurannya. Usaha kecil jarang memiliki akses ke pasar modal saham dan obligasi yang terorganisir. Bahkan jika mereka memiliki akses, biaya peluncuran terkait dengan penjualan sekuritas dalam jumlah terbatas mungkin menjadi penghalang.
2. Ukuran perusahaan menentukan kekuatan barter dalam perjanjian moneter. Biasanya, bisnis besar memiliki akses ke pilihan opsi pembiayaan utang yang lebih luas, termasuk penawaran khusus yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan oleh bisnis kecil. Semakin besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar kemungkinan untuk membuat kesepakatan yang direncanakan berdasarkan referensi kedua pemain daripada menggunakan kontrak kewajiban standar.
3. Ada kemungkinan bisnis yang lebih besar dapat meningkatkan keuntungan mereka karena pengaruh skala terhadap biaya dan pengembalian. Akhirnya, ukuran organisasi diikuti oleh kualitas berbeda yang memengaruhi konstruksi moneter. Fitur lain, misalnya, organisasi seringkali tidak memiliki staf yang luar biasa, tidak menggunakan anggaran keuangan, dan tidak membentuk sistem pembukuan mereka ke dalam sistem administrasi.

Total aset yang akan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi dapat memberikan indikasi ukuran perusahaan. Perusahaan dengan total aset yang banyak menunjukkan telah mencapai kedewasaan karena arus kasnya positif pada saat ini dan dianggap memiliki prospek jangka panjang yang baik. Selain itu, diperkirakan bahwa bisnis yang lebih besar lebih mampu mengelola bisnis dan menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan atau menjadi bahan pertimbangan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nursiam & Nilam Retno Widyaningrum, 2021	Analisis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Asimetri Informasi, dan <i>Free cash flow</i> terhadap Manajemen Laba	<p>1. Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.</p> <p>2. Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.</p> <p>3. Asimetri Informasi tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.</p> <p>4. <i>free cash flow</i> berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba</p>
2.	Fatchan Achyani & Susi Lestari, 2019	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Kepemilikan Manajerial dan Free Cash Flow Terhadap Manajemen Laba	<p>1. Perencanaan pajak tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam</p> <p>2. Beban Pajak Tangguhan tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen laba.</p> <p>3. aset pajak tangguhan tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen laba</p>

No.	Nama Peneliti dan Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)	<p>4. kepemilikan manajerial tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen laba.</p> <p>5. Hasil penelitian ini berpengaruh dikarenakan Free cash flow dapat dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap manajemen berusaha untuk meningkatkan jumlah <i>free cash flow</i> perusahaan.</p>
3.	Lutfi M Baradja, Yuswar Zainul Basri dan Vertari Sasmi, 2019	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	<p>1. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Manajemen Laba.</p> <p>2. Perencanaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam pengungkapan Manajemen Laba.</p> <p>3. Aktiva Pajak Tagguhan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Manajemen Laba</p>

No.	Nama Peneliti dan Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Watriani & Vanica Serly, 2021	Pengaruh <i>Free cash flow</i> terhadap Manajemen Laba: Studi pada Perusahaan Jasa Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019	<i>free cash flow</i> berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2017-2019.
5.	Nisa Nazalia & Dedik Nur Triyanto, 2018	Pengaruh <i>Free cash flow</i> , <i>Financial Distress</i> , Dan <i>Employee diff</i> Terhadap Manajemen Laba	<p>1. <i>free cash flow</i> secara parsial tidak berpengaruh dengan arah negatif terhadap manajemen laba</p> <p>2. <i>financial distress</i> secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap manajemen laba</p> <p>3. <i>employee diff</i> secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap manajemen laba</p>

No.	Nama Peneliti dan Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Muhammad 'Aza Musta'ana & Siti Noor Khikmah, 2021	Pengaruh <i>Free cash flow</i> , <i>Financial Distress</i> , dan <i>Employee diff</i> dan <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Manajemen Laba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa <i>free cash flow</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba 2. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, 3. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa <i>employee diff</i> berpengaruh Terhadap Manajemen Laba
7.	Kurniah Dwi Fatmala & Ikhsan Budi Riharjo, 2021	Pengaruh <i>Free cash flow</i> , Profitabilitas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>free cash flow</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba 2. profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba

No.	Nama Peneliti dan Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Christabel & Nurainun Bangun, 2020	Pengaruh <i>Free cash flow</i> , Struktur Modal, Dan Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>free cash flow</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba 2. struktur modal berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel manajemen laba 3. asimetri informasi berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variable manajemen laba
9.	Pasek Wayan Gejen Tatar & Edy Sujana, 2018	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, <i>Employee diff</i> dan Risiko Litigasi terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba 2. <i>employee diff</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba 3. risiko litigasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba
10.	Apit Susanti & Kevin, 2021	Pengaruh Kepemilikan Manajerial,	1. kepemilikan manajerial (MO) tidak memiliki pengaruh terhadap

No.	Nama Peneliti dan Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Leverage, Employee different Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba</i>	manajemen laba (DACC). 2. <i>Leverage</i> (LEV) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (DACC). 3. variabel <i>Employee different</i> (E_DIFF) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (DACC). 4. aliran arus kas (FCF) berpengaruh terhadap manajemen laba (DACC).
11.	Tasya Bunga Christi, Dewi Fitriyani dan Misni Erwati, 2022	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, <i>Free cash flow</i> Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba	1. kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2. ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total asset berpengaruh terhadap manajemen laba 3. <i>free cash flow</i> berpengaruh terhadap manajemen laba 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
12.	Teguh Erawati & Nurma Ayu	Pengaruh Perencanaan	1. Perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) berpengaruh

No.	Nama Peneliti dan Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Lestari, 2019	Pajak (<i>Tax planning</i>), Kualitas Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba	positif terhadap manajemen laba. 2. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
13.	Dea Savitri Ayu Lestari, Ia Kurnia dan Yuniati, 2019	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	1. Secara parsial Perencanaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba 2. Secara parsial Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba
14	Ainaul Maslihah, 2019	Pengaruh Profitabilitas, Aktiva Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba	1. profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2. berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 3. perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

No.	Nama Peneliti dan Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			4. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba
15.	Irsan Lubis & Suryani, 2018	Pengaruh <i>Tax planning</i> , Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	<p>1. Variabel <i>Tax planning</i> (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>2. Variabel Beban Pajak Tangguhan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>3. Variabel Ukuran Perusahaan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.</p>
16.	Aprih Santoso, 2023	<i>The effect of free cash flow and Leverage on earnings management: Moderating role of good corporate governance</i>	<i>free cash flow has a significant negative impact on revenue</i>
17.	Niellashastri Shania Gayatri & I Wayan	<i>The Influence of Tax planning, Company Size,</i>	<i>1. tax planning has a significant negative effect on earnings management</i>

No.	Nama Peneliti dan Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Pradnyantha Wirasedana, 2021	<i>and Cash Holding on Earnings management in the Infrastructure, Utilities and Transportation Sectors</i>	<i>2. firm size has a significant positive effect on earnings management</i>
18.	Arma Yuliza & Ronia Fitri, 2020	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba	beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba
19	Yogi Maulana Putra, 2020	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	1. Aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 2. Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 3. Perencanaan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba
20	Rr. Sri Handayani & Agustono Dwi Rachadi, 2018	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap manajemen Laba	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap manajemen laba

No.	Nama Peneliti dan Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
21.	Henny Medyawati & Astri Sri Dayanti, 2019	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
22.	Erma Setiawati, Mujiyati & Erma Marga Rosit (2019)	Pengaruh <i>Free Cash Flow</i> Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi	1. <i>free cash flow</i> berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba Aktual 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba Aktual 3. <i>Good Corporate Governance</i> tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara <i>Free Cash Flow</i> dengan Manajemen Laba Aktual
23.	Paulina Millennia Natalia Wijaya & Nora Sri Hendriyeni, 2021	<i>FCF</i> dan <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba Dengan <i>GCG</i> sebagai Pemoderasi	1. <i>free cash flow</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba 2. <i>leverage</i> tidak memengaruhi manajemen laba.
24.	Tanjung Tambunan &	Analisis Pengaruh Profitabilitas,	1. Tidak Ada Pengaruh yang Signifikan antara

No.	Nama Peneliti dan Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Free Cash Flow</i>	variabel <i>Free Cash Flow</i>
	Harlyn L Siagian, 2021	Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba Di Moderasi Ukuran Perusahaan	terhadap Manajemen Laba 2. Terdapat Pengaruh dari Variabel <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba 3. Terdapat Pengaruh dari Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 4. Terdapat Pengaruh dari Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba
25.	Eliza Putri Nadya, 2021	Pengaruh <i>Free Cash Flow</i> Terhadap Manajemen Laba Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi	<i>Free Cash Flow</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.3 Perbedaan dengan penelitian sebelumnya

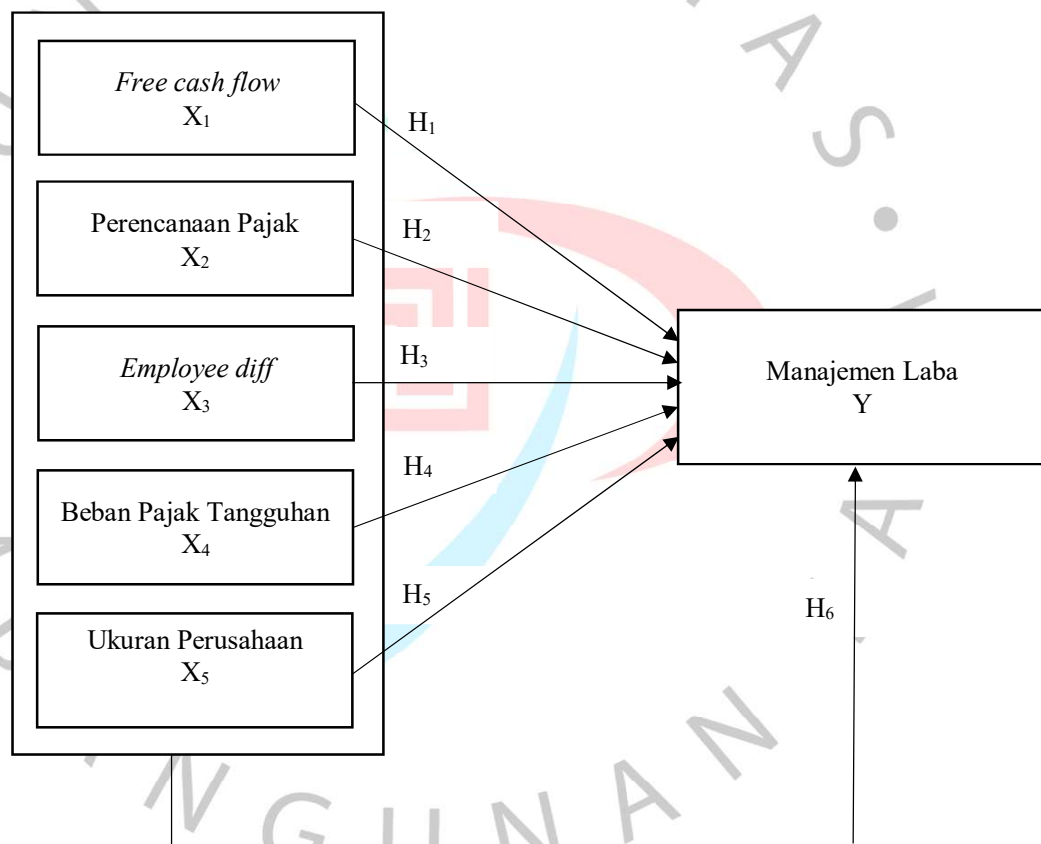
Pada penelitian kali ini terdapat beberapa perbedaan yang dapat dibandingkan dari beberapa penelitian terdahulu seperti variabel-variabel yang berkaitan antara satu sama lain pada penelitian ini berbeda dengan yang sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan adanya penambahan variabel *employee diff*, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan yang di aplikasikan sebagai variabel independen.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali Pengaruh *free cash flow*,

tax planning, *employee diff*, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Hal ini dilakukan karena banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan dan mengetahui pengontrolan sebuah perusahaan terhadap manajemen laba nya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Untuk menggambarkan pengaruh *Free Cash Flow*, Perencanaan Pajak, *Employee Diff*, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan terhadap manajemen laba, maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Free Cash Flow* terhadap Manajemen Laba

Free cash flow merupakan kas yang tersedia diperusahaan yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas/kegiatan (Murhadi, 2016). Semakin besar pendapatan gratis yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka semakin baik perusahaan tersebut karena memiliki dana yang tersedia untuk pembangunan, pembayaran utang, dan laba. Hal ini juga dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai pendapatan gratis yang dimiliki oleh organisasi, maka organisasi tersebut dapat dikategorikan tidak baik karena tidak ada uang yang tersedia untuk pembangunan, cicilan hutang, dan keuntungan perusahaan. (White et al., 2016).

Hasil penelitian Herlambang dan Haryetti (2017), Asyiroh dan Hartono (2019) membuktikan bahwa *free cash flow* memiliki pengaruh negatif pada *earning management* dan penyebabnya adalah tingginya *free cash flow* yang dimiliki perusahaan tidak menarik terlaksanannya *earning management*. Penelitian yang dilakukan oleh Cakti (2019) menunjukkan bahwa *free cash flow* berpengaruh terhadap manajemen laba, hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kono dan Yuyetta (2019); Puspitasari et al., (2019) dan Agustia (2015) yang menyatakan bahwa *free cash flow* berpengaruh terhadap manajemen laba. Menurut Masheyekhi et al., (2018) tujuan manajer perusahaan melakukan manajemen laba dengan *free cash flow* yang tinggi untuk mencapai keuntungan pribadi dalam waktu singkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: *Free cash flow* berpengaruh terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Pengaturan biaya adalah langkah yang diambil oleh eksekutif untuk membatasi tarif pajak untuk tahun ini dan masa depan, tujuannya adalah agar tugas yang dibayarkan dapat dikurangi seefektif mungkin dengan berbagai cara yang sesuai dengan pedoman biaya yang relevan. Salah satu cara di mana bahwa administrasi melakukan misrepresentasi adalah mengontrol informasi dalam laporan keuangan untuk membantu pengurus dan organisasi sehingga data pembukuan yang diberikan tidak menunjukkan keadaan sebenarnya dari organisasi dan dapat menipu klien dari data pembukuan, Astutik (2016).

Dalam kebanyakan kasus, langkah pertama dalam perencanaan pajak adalah menentukan apakah suatu kejadian atau transaksi akan berdampak pada pajak. Jika episode tersebut memiliki efek tugas, dapatkah efek tersebut pada suatu saat dianggap dilarang atau dikurangi berapa biayanya. Selain itu, apakah pembayaran pajak dapat ditangguhkan atau tidak. Besarnya laba yang dilaporkan merupakan salah satu *tax plan* yang akan dimasukkan dalam indikator praktik manajemen laba. Hipotesis berikut dirumuskan oleh penulis berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian sebelumnya:

H2: Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen laba

3. Pengaruh *Employee diff* terhadap Manajemen Laba

Employee diff merupakan variabel ukuran non keuangan. *Employee diff* adalah variabel yang digunakan untuk mengukur perbedaan persentase perubahan dalam pendapatan dengan persentase perubahan jumlah karyawan (Brazel et al., 2019). *Employee diff* menjadi variabel pengukur antara presentase perubahan pendapatan dengan presentase perubahan jumlah tenaga kerja (Brazel et al., 2019). Hal ini didukung dengan adanya pernyataan SAS no. 99 bahwa *non financial measures* untuk mendeteksi penipuan dari perspektif auditor eksternal yang dibebankan dengan tanggung jawab untuk mendeteksi penipuan secara material. Ukuran-ukuran keuangan yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan kurang efektif, karena menejer dapat saja telah memanipulasi data awal yang susah untuk dideteksi dan pada akhirnya akan menimbulkan salah klasifikasi yang tinggi (Alfiah, 2015).

Dalam penelitiannya Brazel et al., (2019) menggunakan variabel-variabel non keuangan antara lain jumlah karyawan, jumlah cabang, jumlah kunjungan pasien, jumlah fasilitas produksi, jumlah paten, jumlah pusat distribusi, dan luas fasilitas produksi. Hasil penelitiannya menunjukkan *employee diff* untuk perusahaan yang melakukan kecurangan secara signifikan lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan manajemen laba. *Employee diff* yang lebih besar mengindikasikan risiko manajemen laba yang lebih besar. Tenaga kerja dalam ilmu ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk proses kegiatan operasional perusahaan dan biaya pengeluarannya harus dibebankan saat terjadinya (Alfiah, 2015). Alfiah (2015) menyatakan bahwa tingginya biaya tenaga kerja dapat

menjadikan penurunan kinerja keuangan, oleh karena itu para menejer akan berusaha untuk menutupinya dengan cara mengurangi jumlah karyawan agar laba bersih dapat meningkat. Dengan demikian, maka rumusan hipotesis nya adalah :

H3 : *Employee diff* berpengaruh terhadap manajemen laba

4. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Semakin besar beban yang dicatatkan oleh perusahaan maka akan semakin kecil laba yang akan diperoleh perusahaan. Begitupun sebaliknya, jika beban yang dicatatkan kecil maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan. Beban pajak tangguhan yang besar akan mengakibatkan tingkat laba menurun, dengan demikian perusahaan dikatakan melakukan tindakan manajemen laba dalam hal memperkecil laba sehingga perusahaan akan memperoleh peluang untuk membayarkan pajak penghasilan yang kecil dibandingkan dengan yang seharusnya. Dengan kata lain jika perusahaan mencatatkan beban pajak tangguhan, maka dapat dikatakan bahwa manajemen perusahaan melakukan praktik manajemen laba dalam hal memperkecil laba. Sehingga dapat dikatakan bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan yang negatif dengan manajemen laba.

Dalam laporan sebelumnya yang disutradarai oleh Fitriani (2015) disebutkan bahwa biaya pembebanan mempengaruhi laba dewan pada organisasi prakitan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Ada tambahan penelitian yang dipimpin oleh Timuriana dan Muhamad (2015) yang mengungkapkan bahwa biaya kebobolan sampai batas tertentu mempengaruhi manfaat eksekutif dalam organisasi prakitan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Sedangkan Mulyani (2018) juga mengarahkan penelitian terkait dampak biaya pungutan kebobolan terhadap keuntungan para eksekutif di 84 organisasi prakitan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015 yang menunjukkan biaya pungutan terkendala berdampak pada dewan.

Berdasarkan uraian tersebut beban pajak tangguhan dapat digunakan oleh manajer untuk menaik turunkan tingkat laba yang ingin diperoleh perusahaan. Semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin kecil pula perusahaan membayar pajaknya. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H4 = Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Total aktiva yang terlibat dalam kegiatan operasional suatu perusahaan digunakan sebagai ukuran besar kecilnya perusahaan untuk membedakan usaha besar dan usaha kecil. Ukuran perusahaan memiliki hubungan metodis dengan keuntungan dewan. Hal ini karena manajemen laba akan dimungkinkan karena bisnis besar memiliki kegiatan operasional yang lebih kompleks daripada bisnis kecil. Secara umum, investor dan pihak luar lainnya sering memiliki kekhawatiran tentang bisnis besar. Dengan tujuan agar mereka sering mendapatkan permintaan untuk mendapatkan data manfaat yang lebih baik. Menurut penelitian Puspitosari (2015) dan Sujana (2018), praktik manajemen laba dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan. Ukuran organisasi dikaitkan dengan kemampuan untuk memengaruhi administrasi dengan manfaat organisasi untuk cakupan yang sangat besar. Oleh karena itu, hal ini dimaksudkan untuk menghitung berapa banyak keuntungan yang diperoleh dewan yang diselesaikan oleh organisasi administrasi. Pemeriksaan ini tidak persis sama dengan eksplorasi oleh Gunawan et al., (2015) yang menyatakan bahwa ukuran organisasi berpengaruh terhadap pendapatan eksekutif. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak serta merta mencegah terjadinya praktik manajemen laba. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba

6. Pengaruh *Free cash flow*, Perencanaan Pajak, *Employee diff*, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Dari uraian yang telah di jelaskan sebelumnya mengenai kelima variabel independen tersebut diduga berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga pada saat jika variabel tersebut diuji diduga data yang ada, hasilnya akan berpengaruh secara signifikan. Dan dapat disimpulkan bahwa Pengaruh *Free cash flow*, Perencanaan pajak, *Employee diff*, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan dapat berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

H6: *Free cash flow*, Perencanaan pajak, *Employee diff*, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba

